



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 15 APRIL 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI

Dorong Aneka Usaha Direvitalisasi Untuk Ketahanan Pangan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Perseroda Aneka Usaha Sidoarjo dinilai cenderung stagnan dan belum menunjukkan peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu perusahaan milik Pemkab Sidoarjo itu perlu direvitalisasi dengan menambah fungsi leading sector dalam penguatan ketahanan pangan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Ahmad Muza'in Saifrial menyatakan, Pemkab Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan daerah perlu memperhatikan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, khususnya terkait penguatan ketahanan pangan sebagai agenda strategis nasional.

Untuk itu, seluruh infrastruktur pendukung, baik kelembagaan, regulasi, maupun sistem distribusi, harus dipersiapkan secara optimal agar implementasi program tersebut dapat berjalan efektif sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

“Saya juga menegaskan bahwa pilihan kebijakan yang paling rasional adalah mendorong Perseroda Aneka Usaha Sidoarjo menjadi lembaga usaha strategis guna mendukung agenda nasional tersebut.”

Langkah ini dinilai lebih efektif dan rasional dibandingkan dengan membentuk perseroda daerah baru yang membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang lebih panjang. “Sementara kebutuhan ketahanan pangan itu mendasar,” cetus Ahmad Muza'in Saifrial, Selasa (14/4).

“Saya menekankan pentingnya kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan pelaku usaha lokal untuk memperkuat kapasitas usaha Perseroda. Muza'in menyebut, pihaknya telah mengambil langkah konkret di DPRD Sidoarjo, dengan mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait penguatan peran BUMD, khususnya Perseroda.

“Alhamdulillah, Ketua DPRD merespon positif usulan tersebut. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat peran BUMD dalam membangun daerah,” tandas Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini. (sta/rus)



Ahmad Muza'in Saifrial. Foto: IRI



MENGELUH: Pedagang es dengan di Jalan Raya Betto, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Harga Plastik Meroket, Pedagang Es Ngos-ngosan

KOTA-Lonjakan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir membuat pedagang kecil di Sidoarjo ngos-ngosan. Salah satunya dirasakan pedagang es dengan di Jalan Raya Betto, Kecamatan Sedati. Mereka terpaksa bertahan tanpa menaikkan harga jual demi menjaga pelanggan. Meski harga plastik terus meroket.

Salah satu pedagang, Yoyok, 48, mengaku kenaikan harga plastik mulai terasa sejak pasc Lebaran. Namun dalam tiga pekan terakhir, lonjakannya semakin tajam hingga menembus lebih dari 100 persen.

“Sejak tiga minggu setelah Lebaran sudah teras naiknya. Sekarang bahkan sudah lebih dari 100 persen. Mungkin juga terdampak situasi perang di Timur Tengah,” ujarnya, Selasa (14/4).

Kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya operasional. Harga plastik es yang sebelumnya Rp 4 ribu per bendel (isi 50 pcs) kini melonjak menjadi Rp 9 ribu atau naik sekitar 125 persen. “Tau kresek kecil juga naik dari Rp 3 ribu menjadi Rp 5 ribu, sementara kresek es besar dari Rp 7 ribu menjadi Rp 10 ribu.

Ke Halaman 10



Kemendikdasmen Revitalisasi 45 Sekolah

SIDOARJO - Jumlah lembaga pendidikan penerima program revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kota Delta bakal bertambah. Kebijakan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat berkunjung ke SMPN 4 Sidoarjo kemarin (14/4).

Abdul Mu'ti mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul. Secara nasional, program tersebut men-

yusar sekitar 16 ribu satuan pendidikan dengan total 61 ribu sekolah. Khusus untuk Sidoarjo, Abdul Mu'ti menyebutkan telah menerima program revitalisasi sebanyak 45 sekolah. Saat ini ada sekitar 45 satuan pendidikan dari berbagai jenjang mulai TK, SD, SMP hingga SMA, SMK, dan SLB yang mendapatkan bantuan. “Sidoarjo berpeluang meningkat hingga dua kali lipat dari jumlah saat ini,” katanya.

Pembekuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang bersumber dari APBN untuk 29 satuan pendidikan pada 2025 sudah tuntas. Capaian tersebut meliputi dua taman kanak-kanak, 24 sekolah dasar, dan tiga sekolah menengah pertama dengan total anggaran Rp 20,3 miliar.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idrayana mengungkapkan, selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab juga mengutamakan pembiayaan melalui APBD. Untuk 2026, Pemkab menyiapkan anggaran Rp 40 miliar. “Kami berharap segera puset dan daerah terus diperkuat agar program berjalan optimal dan berkelanjutan,” jelasnya. (eza/hen)

SIDAK tersebut melibatkan pemerintah desa, Badan Perencanaan Wilayah dan Kota (BPW), serta instansi TNI dan Polri dari Komando Distrik Militer Sidoarjo, Anri Mulyono, mengumumkan bahwa berdasar kan rencana di lapangan, aktivitas pembangunan dampak 5 tahun tersebut dilaksana kan, mulai dari ini.

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

Pemkab Petakan 16 Desa Rawan Kekeringan

BPBD Pantau Daerah Langganan Bencana

SIDOARJO - Memasuki musim kemarau, Pemkab Sidoarjo mulai memetakan desa yang berpotensi dilanda kekeringan. Ada 16 desa yang masuk kategori rawan kekeringan tahun ini. Pemkab berencana menambah sarana pengaliran di desa-desa tersebut.

Sebanyak 16 desa yang masuk kategori rawan kekeringan tersebar di lima kecamatan. Di Balongbendo ada tiga desa yakni Wonokupang, Jabaran, dan Bakung Pringodani. Lalu di Krembung meliputi Desa Kelungsumur, Mojo-runtu, Rejensi, dan Balonggarut. Sementara di Tarik mencakup Desa Mergosari, Kedungbocek, Singgalih, dan Miriprowo.

Selain itu, beberapa kecamatan lain juga berpotensi kekeringan seperti Prambon yang meliputi Desa Simorang, Kedungwonokerto, Bulang dan Wonoplinahan. Satu desa di Candi yakni Sidodadi.

Kabli Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian (Disapta) Sidoarjo Nuzhaf Musdalifah mengatakan, kekeringan yang dialami bukanlah kekeringan ekstrem. “Desa-desa itu masuk rawan kekeringan karena pasokan air berkurang banyak,” kata Nuzhaf.

Dua Ribu Hektare Lahan Pertanian Terdampak
Dia menambahkan, berdasarkan data BWS, ada 2.000 hektar lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan tahun ini. Sebagian besar merupakan lahan pertanian padi. “Ini bencana yang rutin terjadi. Namun kami antisipasi,” tambah Nuzhaf.

Pada 2024, kekeringan cukup parah terjadi di Kecamatan Tarik seperti di Desa Segodabang, Banjarwungu dan Mergosari. Sementara pada 2025, kekeringan terjadi di Desa Bakung Temenggungan, Balongbocek. Nuzhaf mengatakan, saat ini instansi masih berkoordinasi dengan dinas PU untuk menambah sarana pengaliran seperti sumur bor.

Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengungkapkan, kekeringan jadi bencana musiman di Kota Delta. Selain pemetaan, BPBD juga mulai melakukan monitoring terhadap desa terdampak. “Kami pantau desanya jadi langganan kekeringan. Ada koordinasi dengan OPD terkait agar dampak kekeringan tak meluas,” kata Sabino. (fu/hen)

TERANCAM GAGAL PANEN: Dua ribu hektare lahan pertanian berpotensi terdampak kekeringan tahun ini. Termasuk di Desa Sidodadi, Candi.

POTENSI KEKERINGAN 2026
16 desa masuk kategori rawan kekeringan
Desa rawan kekeringan tersebar di 5 kecamatan
Ada 2.000 hektare lahan yang terdampak
Sebagian besar di Kecamatan Krembung

PEMBERSIHAN: Normalisasi sungai di kawasan Sidoarjo dilakukan secara masif.

Cegah Banjir, Enam Saluran Irigasi Dibersihkan

Lima Sungai Dinormalisasi

KOTA-Upaya mewujudkan Sidoarjo bebas banjir terus dibeking. Selasa (14/4), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo mengerahkan seluruh satuan tugas (satgas) untuk bergerak serentak membersihkan saluran irigasi, hingga melakukan pemeliharaan jalan di berbagai titik.

Kepala DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhdum, menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam mengantisipasi banjir sekaligus menjaga infrastruktur tetap optimal. “Pembersihan saluran irigasi, normalisasi sungai, dan pemeliharaan jalan kami lakukan secara simultan. Ini ben-

tuk komitmen kami agar aliran air tetap lancar dan risiko banjir bisa ditekan,” ujarnya.

Dalam aksi pembersihan saluran irigasi, satgas menasar sejumlah titik. Di antaranya saluran sekunder Putat yang menghubungkan Kecamatan Tanggulangin hingga Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di saluran Bokong di Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon; saluran Pelayaran di Desa Petapan Maduretno, Kecamatan Taman; saluran Gedangan 2 di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati; saluran Sidomukti di Desa Keterung, Kecamatan Krian; serta saluran Pagerwojo di Desa Sumorame, Kecamatan Candi.

Seluruh kegiatan difokuskan pada pengangkutan sampah dan sedimentasi yang berpotensi menghambat

Ke Halaman 10

DLHK Tutup TPA Liar di Trompoasri, Dorong Aktivasi TPS 3R

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (samsi) ke lokasi pembuangan sampah yang dilagakkan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) liar di Desa Trompoasri, Selasa (14/4/2026).

Samsi tersebut melibatkan pemerintah desa, Badan Perencanaan Wilayah dan Kota (BPW), serta instansi TNI dan Polri dari Komando Distrik Militer Sidoarjo, Anri Mulyono, mengumumkan bahwa berdasar kan rencana di lapangan, aktivitas pembangunan dampak 5 tahun tersebut dilaksana kan, mulai dari ini.

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

PERHATIAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI TUTUP DILARANG KERAS MELAKUKAN SAMPAH DISINI MELANGKAH KEHADAPAN 6 TAHUN 2012

Dorong Aneka Usaha Direvitalisasi Untuk Ketahanan Pangan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Perseroda Aneka Usaha Sidoarjo dinilai cenderung stagnan dan belum menunjukkan peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu perusahaan milik Pemkab Sidoarjo itu perlu direvitalisasi dengan menambah fungsi leading sector dalam penguatan ketahanan pangan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Ahmad Muzayin Safrial menyatakan, Pemkab Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan daerah perlu memperhatikan misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, khususnya terkait penguatan ketahanan pangan sebagai agenda strategis nasional.

Untuk itu, seluruh infrastruktur pendukung, baik kelembagaan, regulasi, maupun sistem distribusi, harus dipersiapkan secara optimal agar implementasi program tersebut dapat berjalan efektif sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Ia juga menegaskan bahwa pilihan kebijakan yang paling rasional adalah mendorong Perseroda Aneka Usaha Sidoarjo menjadi kelembagaan usaha strategis guna mendukung agenda nasional tersebut.

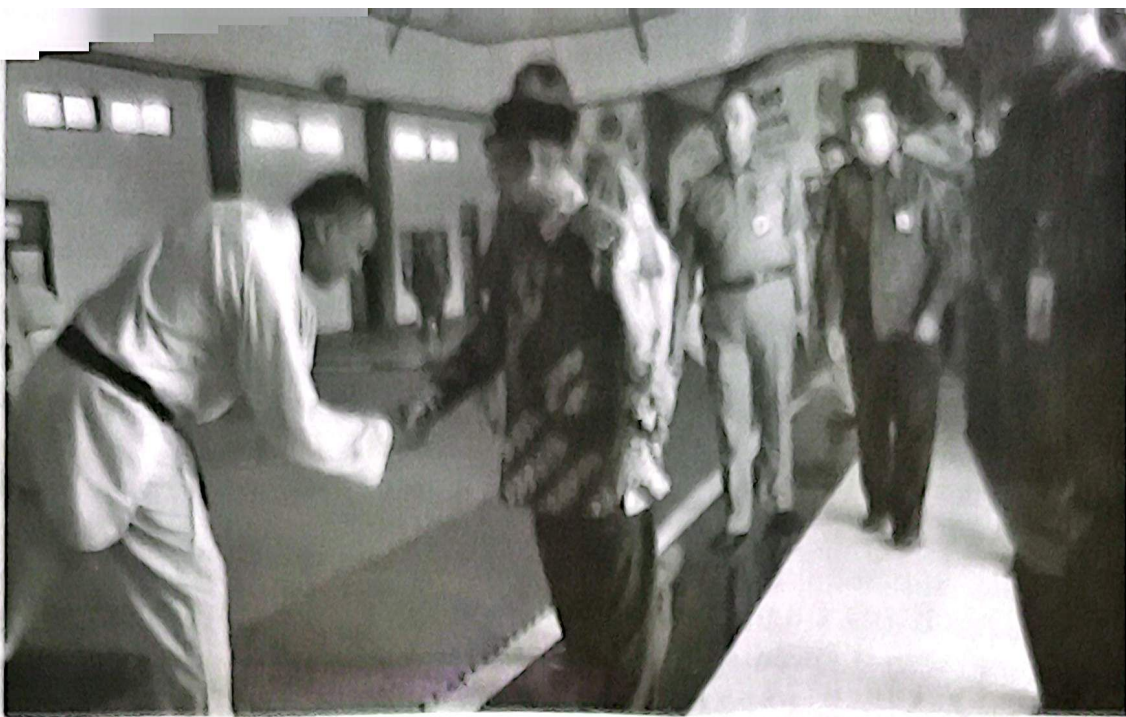
Langkah ini dinilai lebih efektif dan rasional dibandingkan dengan membentuk perseroan daerah baru yang membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang lebih panjang. "Sementara kebutuhan ketahanan pangan itu mendesak," cetus Ahmad Muzayin Safrial, Selasa (14/4).

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan pelaku usaha lokal untuk memperkuat kapasitas usaha Perseroda. Muzayin menyebut, pihaknya telah mengambil langkah konkret di DPRD Sidoarjo, dengan mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait penguatan peran BUMD, khususnya Perseroda.

"Alhamdulillah, Ketua DPRD merespon positif usulan tersebut. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat peran BUMD dalam pembangunan daerah," tandas Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini. (sta/rus)



Ahmad Muzayin Safrial. Foto ist



Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, didampingi Syahrul kepala sekolah SMANOR beserta jajaran.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti Apresiasi SMANOR

Siap Direplikasi Nasional untuk Cetak Bibit Atlet Sejak Dini

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, menyebut SMANOR Jawa Timur di Sidoarjo sebagai model ideal sekolah pencetak atlet masa depan Indonesia. Bahkan, konsep pendidikan yang diterapkan dinilai siap direplikasi secara nasional guna melahirkan generasi unggul berdaya saing global, sejalan dengan visi Prabowo Subianto.

Dalam kunjungannya Selasa (14/4), Abdul Mu'ti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperluas

model sekolah olahraga ke berbagai daerah sebagai langkah strategis menjangkau bibit atlet sejak usia dini.

Menteri yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut menjelaskan bahwa kurikulum di sekolah olahraga dirancang secara khusus, menggabungkan fleksibilitas pembelajaran akademik dengan program latihan intensif bagi para siswa. "Sekolah model seperti ini kita rancang kurikulumnya dengan model yang khusus, dengan pembelajaran yang juga lebih fleksibel menyesuaikan dengan program pelatihan yang ada di sekolah," ujar Abdul Mu'ti.

Pemerintah pusat pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pelopor sekolah olahraga dengan fasilitas dan sistem pembinaan yang terintegrasi, di tengah masih terbatasnya jumlah sekolah serupa di Indonesia. "Ini saya

kira satu bentuk yang sangat orisinal dan dikembangkan, sekolah model seperti ini nanti dapat kita replikasi di daerah-daerah lain," tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menjalin sinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membuka kelas olahraga di sekolah reguler, memperluas jangkauan pembinaan atlet secara nasional.

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora) untuk membuka kelas olahraga di sekolah reguler, sehingga pembinaan atlet dapat menjangkau lebih banyak daerah. Program ini nantinya akan melibatkan berbagai mitra, mulai dari cabang olahraga hingga pihak swasta, agar pembinaan atlet berjalan lebih masif dan terstruktur. (cat/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

FASILITAS PENDIDIKAN BARU: Mendikdasmen Abdul Mu'ti (tengah) bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (kanan) dan Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi (kiri) tiba di SMPN 4 Sidoarjo kemarin (14/4).

Kemendikdasmen Revitalisasi 45 Sekolah

SIDOARJO – Jumlah lembaga pendidikan penerima program revitalisasi sekolah tahun 2026 di Kota Delta bakal bertambah. Kebijakan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat berkunjung ke SMPN 4 Sidoarjo kemarin (14/4).

Abdul Mu'ti mengatakan program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul. Secara nasional, program tersebut me-

nyasar sekitar 16 ribu satuan pendidikan dengan total 61 ribu sekolah.

Khusus untuk Sidoarjo, Abdul Mu'ti menyebut jumlah penerima program berpotensi bertambah. Saat ini ada sekitar 45 satuan pendidikan dari berbagai jenjang, mulai TK, SD, SMP hingga SMA, SMK, dan SLB yang mendapat bantuan. "Sidoarjo berpeluang meningkat hingga dua kali lipat dari jumlah saat ini," katanya.

Pemkab memastikan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang bersumber dari APBN untuk 29 satuan pendidikan pada 2025

sudah tuntas. Capaian tersebut meliputi dua taman kanak-kanak, 24 sekolah dasar, dan tiga sekolah menengah pertama dengan total anggaran Rp 20,3 miliar.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengungkapkan, selain dukungan dari pemerintah pusat, pemkab juga menguatkan pembiayaan melalui APBD. Untuk 2026, pemkab menyiapkan anggaran Rp 40,6 miliar. "Kami berharap sinergi pusat dan daerah terus diperkuat agar program berjalan optimal dan berkelanjutan," jelasnya. *(eza/hen)*

Jawa Pos

APBN Tanggung Tambahan Biaya Penerbangan Haji

Akibat Kenaikan Harga Avtur dan Selisih Kurs

JAKARTA – Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati penambahan biaya penerbangan haji sebesar Rp 1,77 triliun dibebankan pada APBN. Tambahan tersebut untuk menutup kenaikan harga avtur dan selisih kurs.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pemerintah siap menutupi kekurangan biaya tersebut. Saat ini, Kemenhaj sedang berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna mengantisipasi poten-

USULAN KENAIKAN BIAYA PENERBANGAN HAJI 2026



Sumber: Kemenhaj

si persoalan hukum.

Pembahasan bersama Kejangung dinilai penting karena sesuai UU 14/2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, biaya penerbangan jemaah bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sementara, biaya penerbangan bagi petugas berasal dari



GARUDA INDONESIA

Jumlah jemaah:	101.954
Harga tiket awal:	Rp 32,9 jutaan/jemaah
Rencana kenaikan harga tiket:	Rp 42,47 jutaan/jemaah
Total usulan harga tiket:	Rp 4,33 triliun
Selisih kekurangan:	Rp 974,874 miliar



SAUDIA AIRLINES

Jumlah jemaah:	101.366
Harga tiket awal:	Rp 32,9 jutaan/jemaah
Rencana kenaikan harga tiket:	Rp 40,83 jutaan/jemaah
Total usulan harga tiket:	Rp 4,139 triliun
Selisih kekurangan:	Rp 802,81 miliar

Total kekurangan biaya penerbangan haji: Rp 1,77 triliun

GRAFIS: HERLAMBAH/JAWA POS

APBN. "Intinya, pemerintah siap menutupi kekurangan itu," jelas Irfan.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengakui bahwa biaya penerbangan calon jemaah haji (CJH) merupakan bagian dari BPIH. Namun, dalam kondisi darurat seperti saat ini, pemerintah perlu mengambil lang-

kah solusi.

Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kenaikan biaya haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah. "Para menteri terkait harus segera berkoordinasi menemukan landasan hukum agar penggunaan keuangan negara tidak menimbulkan masalah hukum," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan, Kemenhaj harus konsisten dengan arahan dari presiden bahwa kenaikan harga penerbangan haji akibat lonjakan harga avtur dan selisih kurs tidak boleh membebani jemaah. (wan/aph)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Petakan 16 Desa Rawan Kekeringan

BPBD Pantau Daerah Langganan Bencana

SIDOARJO - Memasuki musim kemarau, Pemkab Sidoarjo mulai memetakan desa yang berpotensi dilanda kekeringan. Ada 16 desa yang masuk kategori rawan kekeringan tahun ini. Pemkab berencana menambah sarana pengairan di desa-desa tersebut.

Sebanyak 16 desa yang masuk kategori rawan kekeringan tersebar di lima kecamatan. Di Balongbendo ada tiga desa yakni Wonokupang, Jabaran, dan Bakung Pringgodani. Lalu di Krembung meliputi Desa Kedungsumur, Mojo-runtut, Rejeni, dan Balonggarut. Sementara di Tarik mencakup Desa Mergosari, Kedungbocok, Singogalih, dan Mliriprowo.

Selain itu, beberapa kecamatan lain juga berpotensi

kekeringan seperti Prambon yang meliputi Desa Simogirang, Kedungwonokerto, Bulang dan Wonoplintahan. Satu desa di Candi yakni Sidodadi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaptera) Sidoarjo Nufah Musdalifah mengatakan, kekeringan yang dialami bukanlah kekeringan ekstrem. "Desa-desa itu masuk rawan kekeringan karena pasokan air berkurang banyak," kata Nufah.

Dua Ribu Hektare Lahan Pertanian Terdampak

Dia menambahkan, berdasar data BBWS, ada 2.000 hektar lahan pertanian yang berpotensi berdampak kekeringan tahun ini. Sebagian besar merupakan lahan pertanian padi. "Ini bencana yang rutin terjadi. Namun kami antisipasi," tambah Nufah.

Pada 2024, kekeringan cukup

parah terjadi di Kecamatan Tarik seperti di Desa Segodobacang, Banjarwungu dan Mergosari. Sementara pada 2025, kekeringan terjadi di Desa Bakung Temenggungan, Balongbendo. Nufah mengatakan, saat ini instansinya masih berkoordinasi dengan dinas PU untuk menambah sarana pengairan seperti sumur bor.

Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengungkapkan, kekeringan jadi bencana musiman di Kota Delta. Selain pemetaan, BPBD juga mulai melakukan monitoring terhadap desa terdampak. "Kami pantau desa yang jadi langganan kekeringan. Ada koordinasi dengan OPD terkait agar dampak kekeringan tak meluas," kata Sabino. (ful/hen)

**TERANCAM
GAGAL PANEN:**
Dua ribu hektare lahan pertanian berpotensi terdampak kekeringan tahun ini. Termasuk di Desa Sidodadi, Candi.



POTENSI KEKERINGAN 2026

16 desa masuk kategori rawan kekeringan

Desa rawan kekeringan tersebar di 5 kecamatan

Ada 2.000 hektare lahan yang terdampak

Sebagian besar di Kecamatan Krembung

Sumber: Pemkab Sidoarjo

Jawa Pos

691 CJH Belum Jalani Vaksinasi Meningitis

Terkendala Kondisi Kesehatan

SIDOARJO - Jelang keberangkatan ibadah haji tahun 2026, belum semua calon jemaah haji (CJH) asal Sidoarjo menjalani vaksinasi meningitis. Dari 2.691 jemaah yang menjadi sasaran, ada 691 orang yang belum vaksin.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Djoko Setijono mengatakan bahwa vaksinasi sudah dimulai sejak 4 April 2026 lalu. Layanan diberikan kepada seluruh CJH yang terdaftar. Total sasaran vaksinasi mencapai 2.691 jemaah.

"Dari 2.691 jemaah, sebanyak 2.000 orang sudah vaksin," kata Djoko. Menurut dia, sebagian jemaah yang belum divaksin umumnya terkendala kondisi kesehatan dan pekerjaan. Sebagian karena masih sibuk dengan keperluan lain.

Ikut Jadwal Susulan

Djoko menegaskan, vaksinasi meningitis harus



Dari 2.691 jemaah, sebanyak 2.000 orang sudah vaksin."

dr Djoko Setijono

*Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
Dinkes Sidoarjo*

dituntaskan sebelum keberangkatan jemaah. Sesuai ketentuan, vaksin diberikan minimal 10 hari sebelum berangkat ke Tanah Suci. Karena itu, Dinkes terus mempercepat vaksinasi agar seluruh CJH dapat terlayani.

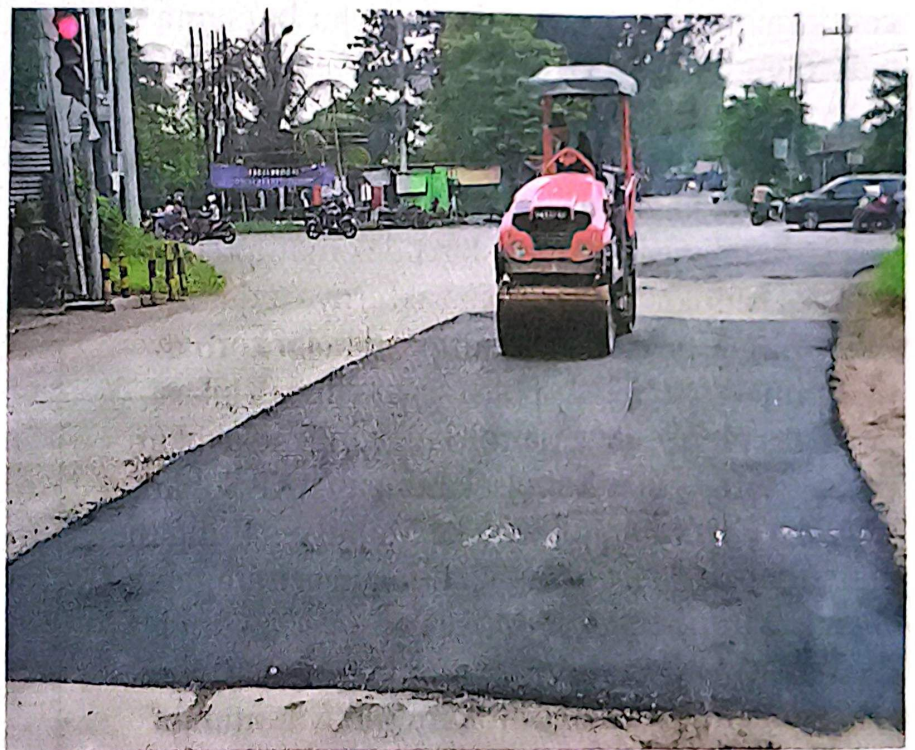
Jemaah yang belum divaksin akan mengikuti jadwal susulan sesuai kondisi masing-masing. "Nanti akan kami jadwalkan ulang melalui puskesmas," ujar Djoko. Menurut dia, Dinkes memastikan seluruh sasaran terlayani sebelum batas waktu keberangkatan. (ful/hen)

Perbaiki Lima Jalan Rusak Ditargetkan Tuntas April

SIDOARJO - Jumlah jalan rusak yang masuk program perbaikan terus bertambah. Setelah menuntaskan penambalan di 41 ruas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Margas dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo bakal memperbaiki lima ruas jalan lagi bulan ini.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo M. Makhmud mengatakan, lima ruas yang diperbaiki meliputi Sidokare-Sepande, Sawocangkring-Lambang, Pekarungan-Terungwetan, Krian-Kemangsen, serta Wonokalang-Jerukgamping. "Perbaikan yang dilakukan berupa penambalan jalan dengan aspal mix," papar Makhmud kemarin (14/4).

Dia menambahkan, penambalan ini dilakukan sebelum dibeton. Tujuannya untuk meratakan jalan agar pelaksanaan betonisasi lebih mudah. Setelah kondisi jalan cukup



DPUBMSDA SIDOARJO

AKAN DIBETON: Petugas DPUBMSDA Sidoarjo menambal Jalan Kemangsen yang rusak kemarin (14/4).

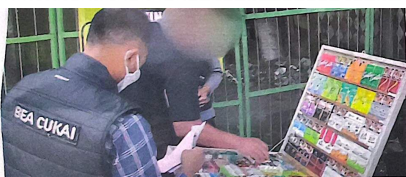
rata, nantinya baru akan dilanjutkan dengan betonisasi.

Makhmud menambahkan, pekerjaan perbaikan tersebut sudah dimulai sejak awal pekan lalu dan ditargetkan rampung pada akhir bulan ini. "Pokoknya sebulan ini kami targetkan selesai lima

dulu setelah itu baru mengerjakan titik lainnya," paparnya.

Sebelumnya, ada 41 jalan yang dilaporkan rusak parah. Perbaikan 37 ruas selesai sebelum Lebaran. Selain penambalan, Pemkab juga akan memperkuat sejumlah ruas jalan dengan beton. (eza/hen)

Jawa Pos



TAK PUNYA IZIN: Petugas Bea Cukai Sidoarjo menyita sejumlah rokok ilegal dari pedagang di Jalan Raya Tropodo, Waru.

Sebulan, Bea Cukai Sita Tiga Juta Batang Rokok Ilegal

SIDOARJO - Bea Cukai Sidoarjo mengungkap 27 kasus peredaran rokok ilegal selama Maret 2026. Dari penindakan tersebut, tiga juta lebih batang rokok tanpa pita cukai berhasil diamankan petugas di Sidoarjo

hingga Surabaya.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Sidoarjo Gatot Kuncoro mengatakan, total barang bukti yang disita mencapai tiga juta batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan

mencapai 4,5 miliar. "Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 2,26 miliar," kata Gatot.

Dia mengatakan, selama Januari hingga Maret 2026, Bea Cukai Sidoarjo telah me-

lakukan 67 penindakan. Dari operasi tersebut, total barang bukti mencapai 15.450.960 batang rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp 22,9 miliar. Gatot menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan

pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. "Kami terus mengimbau agar masyarakat tidak memperjualbelikan rokok ilegal," ungkapnya. (eza/hen)

Jawa Pos

DLHK Tutup TPA Liar di Trompoasri, Dorong Aktivasi TPS 3R

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembuangan sampah yang dikategorikan sebagai tempat pemrosesan akhir (TPA) liar di Desa Trompoasri, Selasa (14/4/2026).

Diky Putra Sanslri, Wartawan Radar Sidoarjo

SIDAK tersebut melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur TNI dan Polri dari Koramil dan Polsek setempat. Plt Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, men-

gungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut diduga telah berlangsung ~~selama beberapa tahun~~ negaskan, mulai saat ini

● Ke Halaman 10



MERUSAK LINGKUNGAN: DLHK Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembuangan sampah yang dikategorikan sebagai tempat pemrosesan akhir liar di Desa Trompoasri, Selasa (14/4).



DLHK Tutup TPA...

lokasi tersebut ditutup untuk umum, khususnya bagi pembuangan sampah dari luar wilayah desa.

"Kami tutup sementara sampai manajemen desa siap. Untuk saat ini, layanan diprioritaskan bagi warga Desa Trompoasri melalui sistem baru yang akan disiapkan. Kami ingin desa ini kembali bersih sesuai namanya, Trompoasri yang asri," ujarnya.

Arif menjelaskan, tumpukan sampah yang menggunung dan kondisi lingkungan yang kumuh terjadi akibat belum adanya sistem pengelolaan sampah

yang memadai di tingkat desa. Karena itu, DLHK mendorong Pemerintah Desa Trompoasri segera mengaktifkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) sebagai solusi jangka pendek, agar warga tidak lagi membuang sampah ke lahan liar.

Sementara itu, mantan Kepala Dusun Bendungan Trompoasri, Rofiq, menyebut sebagian besar limbah plastik sisa industri. Pihaknya kini berkoordinasi dengan DLHK untuk mengidentifikasi asal perusahaan pembuang limbah tersebut, agar penanganannya bisa lebih jelas dan terarah.

"Kami ingin tahu sampah ini berasal dari perusahaan mana, supaya ke depan pengelolaannya bisa dilakukan secara jelas melalui desa atau BUMDes," katanya.

Meski demikian, di lokasi tersebut juga terdapat aktivitas pemilahan sampah yang melibatkan warga sekitar. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga sampah yang masih memiliki nilai jual dapat dimanfaatkan.

"Tenaga kerjanya warga sini sendiri. Kami upayakan melalui BUMDes agar

masyarakat tetap mendapat penghasilan dan sampah bisa lebih terkelola," tambah Rofiq.

Plt Kepala Desa Trompoasri, Suyanto, mengakui persoalan sampah di wilayahnya kini sudah berada pada titik kritis. Ia menyebut, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun pada masa kepala desa sebelumnya hingga kini belum berfungsi optimal dan bahkan mangkrak selama dua hingga tiga tahun.

Menurutnya, kendala utama terletak pada belum siapnya infrastruktur penun-

jang serta belum adanya pengelola yang kompeten. "Kendalanya ada pada SDM pengelola dan peralatan yang belum memadai. Karena itu, sampai sekarang TPST belum bisa difungsikan," ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan bagi pemerintah desa untuk mengelola sistem persampahan secara profesional. Ke depan, pihaknya berharap ada dukungan dari pemerintah daerah agar persoalan sampah di Trompoasri dapat segera teratasi secara menyeluruh. (dik/vga)





PEMBERSIHAN: Normalisasi sungai di kawasan Sidoarjo dilakukan secara masif.

Cegah Banjir, Enam Saluran Irigasi Dibersihkan

■ Lima Sungai Dinormalisasi

KOTA-Upaya mewujudkan Sidoarjo bebas banjir terus dikebut. Selasa (14/4), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo mengerahkan seluruh satuan tugas (satgas) untuk bergerak serentak membersihkan saluran irigasi, menormalisasi sungai, hingga melakukan pemeliharaan jalan di berbagai titik.

Kepala DPUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Makhmud, menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam mengantisipasi banjir sekaligus menjaga infrastruktur tetap optimal.

"Pembersihan saluran irigasi, normalisasi sungai, dan pemeliharaan jalan kami lakukan secara simultan. Ini ben-

tuk komitmen kami agar aliran air tetap lancar dan risiko banjir bisa ditekan," ujarnya.

Dalam aksi pembersihan saluran irigasi, satgas menysasar sejumlah titik. Di antaranya saluran sekunder Putat yang menghubungkan Kecamatan Tanggulangin hingga Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Selain itu, pembersihan juga dilakukan di saluran Bokong di Desa Kedungkembar, Kecamatan Prambon; saluran Pelayaran di Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman; saluran Gedangan 2 di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati; saluran Sidomukti di Desa Keterungan, Kecamatan Krian; serta saluran Pagerwojo di Desa Sumorame, Kecamatan Candi.

Seluruh kegiatan difokuskan pada pengangkutan sampah dan sedimentasi yang berpotensi menghambat

● Ke Halaman 10

Cegah Banjir,...

aliran air. Di sektor normalisasi sungai, satgas juga menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur dan sampah di sejumlah lokasi, seperti Saluran Porong Kanal di Desa Cangkring, Kecamatan Krembung dan Anak Afvour Sidokare di Kelurahan Urangagung, Kecamatan Sidoarjo.

Pekerjaan serupa dilakukan di saluran Gedangan area Pasmar 2, Losing Mangetan Kanal di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, serta pembersihan sampah di saluran Pelayaran Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman. Men-

urut Makhmud, normalisasi ini penting untuk mengembalikan kapasitas tampung saluran agar tidak meluap saat debit air meningkat.

“Sedimen dan sampah yang menumpuk menjadi salah satu penyebab utama genangan. Karena itu, kami fokus pada pengerukan dan pembersihan agar fungsi saluran kembali maksimal,” jelasnya.

Selain penanganan sektor air, pemeliharaan jalan juga dilakukan di sejumlah ruas strategis, di antaranya Sidokare–Sepande, Sawocangkring–Lambangan, Pekarungan–Terungwetan, Krian–Kemangsen, hingga Wonokalang–Jerukgamping. Pekerjaan meliputi perbaikan ringan hingga

pembersihan jalan menggunakan alat berat dan tenaga manual guna menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan.

“Selain sektor air, kami juga memastikan kondisi jalan tetap layak. Infrastruktur yang terawat akan mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi,” tambahnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk turut berperan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat sangat penting agar saluran tetap bersih dan upaya pencegahan banjir berjalan optimal,” pungkasnya. (dik/vga)



MENGELUH: Pedagang es degan di Jalan Raya Betro, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

Harga Plastik Meroket, Pedagang Es Ngos-ngosan

KOTA-Lonjakan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir membuat pedagang kecil di Sidoarjo ngos-ngosan. Salah satunya dirasakan pedagang es degan di Jalan Raya Betro, Kecamatan Sedati. Mereka terpaksa bertahan tanpa menaikkan harga jual demi menjaga pelanggan. Meski harga plastic terus meroket

Salah satu pedagang, Yoyok, 48, mengaku kenaikan harga plastik mulai terasa sejak pasca Lebaran. Namun dalam tiga pekan terakhir, lonjakannya semakin tajam hingga menembus lebih dari 100 persen.

“Sejak tiga minggu setelah Lebaran sudah terasa naiknya. Sekarang bahkan sudah lebih dari 100 persen. Mungkin juga terdampak situasi perang di

Timur Tengah,” ujarnya, Selasa (14/4).

Kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya operasional. Harga plastik es yang sebelumnya Rp 4 ribu per bendel (isi 50 pcs) kini melonjak menjadi Rp 9 ribu atau naik sekitar 125 persen. Tas kresek kecil juga naik dari Rp 3 ribu menjadi Rp 5 ribu, sementara kresek es besar dari Rp 7 ribu menjadi Rp 10 ribu.

Meski biaya terus membengkak, Yoyok memilih tidak menaikkan harga jual es degannya yang tetap dipatok Rp 6 ribu per bungkus. Keputusan itu diambil agar pelanggan tidak beralih ke pedagang lain.

“Kalau dinaikkan, takut pembeli berkurang. Jadi tetap dipertahankan harganya,” katanya.

● Ke Halaman 10

✓ **Harga Plastik Meroket,...**

Menurutnya, kenaikan harga plastik kali ini menjadi yang paling tinggi dibandingkan sebelumnya. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil

langkah untuk menstabilkan harga, agar pelaku usaha kecil tidak semakin terbebani. “Harapannya ada solusi supaya harga bisa turun seperti semula, karena ini sangat memberatkan pedagang kecil,” tandasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TPA Liar Trompoasri Resmi Ditutup

Ditemukan Sampah Industri

Sidoarjo, Memorandum

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Arif Mulyono inspeksi mendadak (sidak), Selasa (14/4). Tujuannya, lokasi pembuangan sampah yang dikategorikan sebagai tempat pemrosesan akhir (TPA) liar di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon. Sidak itu juga didampingi perangkat desa, perwakilan BPD, serta personel dari Koramil dan Polsek Jabon.

Temuan di lapangan, aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut disinyalir telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Dan, salah satu material dapat digolongkan sampah industri. Karena itu, ia menegaskan menutup TPA itu untuk umum. Terutama bagi pembuang sampah dari luar wilayah.

"Kami tutup sampai mana-

jemen desa siap. Untuk saat ini, layanan diprioritaskan untuk warga Desa Trompoasri melalui sistem yang baru nanti. Kami ingin desa ini kembali bersih sesuai namanya, Trompoasri yang asri," tegas Arif Mulyono.

Dikatakan, tumpukan sampah yang menggunung dan tercecer hingga menimbulkan kesan kumuh ini terjadi akibat belum adanya sistem

pengelolaan sampah yang memadai di tingkat desa. "Kami hadir di sini bersama pihak desa, kecamatan, polsek, maupun koramil. Ternyata benar, kondisinya seperti ini. Hal ini terjadi karena belum ada manajemen pengelolaan sampah di Desa Trompoasri yang baik dan benar," paparnya.

Sebagai langkah jangka pendek, DLHK mendorong Pemdes Trompoasri untuk segera mengaktifkan tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R). Dengan adanya fasilitas ini, warga tidak lagi membuang sampah ke lahan liar tersebut.

Mantan Kasun Bendungan Trompoasri, Rofiq menyatakan, sampah-sampah tersebut seba-

gian besar merupakan limbah plastik sisa industri. Saat ini, pihaknya bekerja sama dengan DLHK untuk mengidentifikasi perusahaan mana saja yang membuang limbah di lokasi tersebut.

"Kami berkoordinasi dengan DLHK agar lebih mudah mengidentifikasi sampah ini dari perusahaan mana. Tujuannya supaya nanti pengelolannya jelas dan bisa ditangani melalui pihak desa atau BUMDes," ujar Rofiq.

Meski terlihat menumpuk, Rofiq menjelaskan bahwa di lokasi tersebut terdapat aktivitas pemilahan sampah yang melibatkan warga sekitar. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mas-

yarakat agar sampah yang masih memiliki nilai jual dapat dikelola dengan baik.

"Tenaga kerjanya ya warga sini sendiri yang memilah. Kita manfaatkan melalui BUMDes agar warga punya pekerjaan dan sampah ini tidak hanya menumpuk tapi terkelola," tambahnya.

Plt Kades Trompoasri Suyanto mengatakan, permasalahan sampah di desanya kini mencapai titik kritis. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang seharusnya menjadi solusi penanganan limbah warga, diketahui telah mangkrak selama kurang lebih dua hingga tiga tahun. Akibatnya, praktik pembuangan sampah liar kian marak dan mengancam keseha-



Tim gabungan yang dikomandoi DLHK menutup TPA liar Trompoasri.

tan masyarakat setempat.

Disebutkan, fasilitas TPST tersebut dibangun pada masa kepemimpinan kades sebelumnya. Namun, hingga kini gedung tersebut belum bisa difungsikan secara optimal.

Menurut Suyanto, alasan utama gedung TPST tersebut dibiarkan kosong adalah karena ketidaksiapan infrastruktur penunjang. "Kendalanya adalah

mencari pengelola sampah. Di samping itu, alat-alat pendukungnya belum ada dan belum siap. Makanya sampai sekarang belum bisa difungsikan," ujar Suyanto.

Hingga saat ini, Pemdes Trompoasri masih terkendala keterbatasan dana dan peralatan untuk menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak profesional. (kri/jok/epa)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Sigit Imam Basuki, ST sedang menyoroti Sekda Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati yang sedang lawatan ke Korsel.

SOROTAN!! SEKDA SIDOARJO DIJABAT AINUR, FENNY TERBANG KE KOREA SELATAN

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

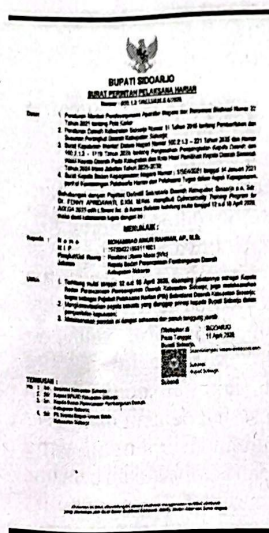
Sorotan tajam dari pegiat sosial JCW, Sigit Imam Basuki, ST menyoroti lawatan Sekda definitif Dr.Fenny Apridawati ke Korsel, sebab sedang hangat-hangatnya tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sebuah dokumen internal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memunculkan tanda tanya.

Dokumen tertanggal 11 April 2026 itu berisi penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Alasannya jelas: Sekretaris Daerah sedang berada di luar negeri.

Berdasarkan dokumen tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mengikuti Cybersecurity Training Program for ADLGA 2025 di Korea Selatan pada 12 hingga 18 April 2026. Selama hampir sepekan itu, posisi strategis tersebut dijalankan oleh pejabat pelaksana harian.

“Perjalanan ini terjadi pada momentum yang sensitif. Pemerintah pusat tengah menekan belanja daerah, terutama perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak prioritas,” tegas Ketua JCW Sigit Imam Basuki, ST, Selasa (14/4/2026).

Informasi perjalanan ini tidak muncul dari pengumu-



man resmi, melainkan dari dokumen administratif internal. Surat penunjukan Plh menjadi petunjuk awal bahwa Sekda tidak berada di tempat. Perjalanan tersebut nyaris tanpa penjelasan kepada publik.

Padahal, jabatan Sekretaris Daerah bukan posisi teknis biasa. Sekda merupakan motor koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah. Ketidakhadiran selama hampir satu minggu bukan hal sepele.

“Dari sini muncul pertanyaan mendasar muncul: seberapa mendesak pelatihan tersebut?,” kata Sigit.

Pelatihan keamanan siber memang relevan di era

digital. Namun urgensinya menjadi perdebatan ketika dikaitkan dengan lokasi dan waktu pelaksanaan.

Pertanyaan ini menguat karena waktunya berurusan dengan kebijakan efisiensi anggaran. “Ini bukan semata soal boleh atau tidak. Ini soal sensitivitas di tengah kebijakan penghematan,” ujarnya.

Bukan Kali Pertama

Sorotan terhadap pejabat yang bersangkutan bukan kali ini saja. Sekda Fenny Apridawati sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik setelah menggelar acara buka bersama bermuansa India yang dinilai mewah dan viral di media sosial, kerap disebut warganet sebagai “bukber ala India Kajol”. Bupati Subandi ikut hadir dalam bukber tersebut.

“Acara tersebut memicu kritik terhadap gaya hidup birokrasi yang dianggap tidak sejalan dengan semangat kesederhanaan. Kini, perjalanan luar negeri tersebut kembali memperkuat persepsi publik. Bagi sebagian kalangan, dua peristiwa ini membentuk satu pola: adanya jarak antara narasi kesederhanaan dan praktik di lapangan,” cetus Sigit Imam Basuki. (Khol/Dy)

Geger Limbah Industri di Jabon

▶ Tutup TPA Liar, Aktivitas sudah 2 Tahun

SIDOARJO, SURYA - Tumpukan limbah industri di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, memicu kehebohan. Lokasi pembuangan tersebut diketahui tidak berizin alias ilegal. *dengan dominasi sampah industri yang menggunung.*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo langsung turun ke lokasi, Selasa (14/4). Petugas mengambil tindakan tegas dengan menutup tempat pembuangan sampah ilegal itu.

Plt Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, datang bersama perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur TNI-Polri dari Koramil dan Polsek setempat.

Menurut Arif, aktivitas pembuangan sampah di lahan tersebut diduga telah berlangsung sekitar dua tahun. Kondisi diperparah oleh masuknya sampah dari luar desa, sehingga tumpukan limbah makin menggunung dan kumuh.

"Mulai hari ini, lokasi ini resmi kami tutup untuk umum, terutama bagi pembuang sampah dari luar wilayah. Kami tutup sampai manajemen desa siap," tegas Arif.

Tumpukan sampah yang tercecer merupakan dampak belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang memadai di tingkat desa. Sebagai solusi jangka pendek,



SURYA/MTAUFIK

LEGAL --DLHK Sidoarjo dan sejumlah pihak saat menutup tempat pembuangan limbah ilegal di kawasan Jabon, Selasa (14/4).

pihaknya mendorong Pemerintah Desa Trompoasri segera mengaktifkan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).

"Kami ingin desa ini kembali bersih sesuai namanya, Trompoasri yang asri. Layanan pembuangan sampah nantinya diprioritaskan bagi warga lokal melalui sistem manajemen yang baru," imbuhnya.

Di sisi lain, mantan Kepala Dusun (Kasun) Bendungan Trompoasri, Rofiq, membenarkan sebagian besar tumpukan sampah merupakan limbah plastik industri. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan DLHK untuk melacak perusahaan yang membuang limbah secara ilegal di lokasi tersebut.

"Kami koordinasi dengan DLHK untuk mengidentifikasi sampah ini dari perusahaan mana. Tujuannya agar ke

depan pengelolaannya lebih jelas, baik melalui pihak desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," kata Rofiq.

Meski menjadi TPA liar, Rofiq menyebut sempat ada aktivitas pemilahan sampah yang melibatkan warga sekitar sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.

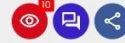
"Tenaga kerjanya warga sini sendiri. Kami ingin sampah ini tidak hanya menumpuk, tapi memberikan nilai manfaat ekonomi bagi warga melalui pemilahan," ujarnya.

Kondisi kritis sampah di Desa Trompoasri dipicu mangkraknya gedung Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) milik desa. Plt Kepala Desa Trompoasri, Suyanto, mengakui fasilitas yang dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya itu sudah tidak berfungsi hampir tiga tahun. (ufi)

Beranda > Pemerintahan >

Pemerintahan

45 Sekolah di Sidoarjo Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah

 Redaksi 3 Min Baca
15 April 2026


Sidoarjo, Arjunanusantaranews.com, – 45 sekolah di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari pemerintah pusat. Bantuan pembenahan sarana dan prasarana sekolah tersebut menysasar sekolah di Kabupaten Sidoarjo mulai jenjang PAUD sampai SMA.

Selain itu Program Digitalisasi Sekolah juga diberikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah/Kemendikdasmen RI kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 1.577 Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital (smartboard) telah diterima berbagai jenjang sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Program Digitalisasi Sekolah tahun anggaran 2025 itu sukses terlaksana di Kabupaten Sidoarjo. Siang tadi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu'ti meresmikan revitalisasi seluruh sekolah penerima bantuan program tersebut, Selasa (14/4/2026).

Peresmian dilakukan di Aula SMP Negeri 4 Sidoarjo bersama Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Prof. Dr. Abdul Mu'ti mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo atas dukungannya terhadap program kementeriannya tersebut.

"Kami berterimakasih kepada bapak bupati dan ibu wakil bupati Sidoarjo yang telah mendukung program revitalisasi dan digitalisasi yang alhamdulillah yang telah terlaksana 100 persen," ucapnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu'ti mengatakan terdapat 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang memperoleh Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat 45 satuan pendidikan yang direvitalisasi. Nilainya mencapai Rp. 45 Milyar lebih.

45 Sekolah di Sidoarjo Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu Kemendikdasmen RI juga memberikan bantuan Program Digitalisasi Sekolah berupa Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital (smartboard). Sebanyak 608 ribu lebih IFP itu telah diterima sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Alat untuk mendukung pembelajaran interaktif itu juga telah diterima sekolah – sekolah di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.577 IFP.

"Kami berharap agar sarana-sarana yang sudah dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Dikatakannya tahun 2026 ini Kemendikdasmen juga sudah mengalokasikan 11.400 lebih revitalisasi satuan pendidikan. Sebagian sekolah bahkan sudah terverifikasi dan tervalidasi untuk segera dilakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan program. Alokasi tersebut ujar Prof. Dr. Abdul Mu'ti, bakal ditambah untuk 60 ribu satuan pendidikan.

"Inshaallah sesuai dengan komitmen bapak presiden, tahun ini ada tambahan untuk 60 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi," ucapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

ARJUNA NUSANTARA NEWS.COM

Berita Daerah Nusantara Pemerintahan Pembangunan Pendidikan Kesehatan

"Kami berterimakasih kepada bapak bupati dan ibu wakil bupati Sidoarjo yang telah mendukung program revitalisasi dan digitalisasi yang alhamdulillah yang telah terlaksana 100 persen," ucapnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. Abdul Mu'ti mengatakan terdapat 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang memperoleh Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri terdapat 45 satuan pendidikan yang direvitalisasi. Nilainya mencapai Rp. 45 Milyar lebih.

45 Sekolah di Sidoarjo Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Selain itu Kemendikdasmen RI juga memberikan bantuan Program Digitalisasi Sekolah berupa Interactive Flat Panel (IFP) atau papan interaktif digital (smartboard). Sebanyak 608 ribu lebih IFP itu telah diterima sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Alat untuk mendukung pembelajaran interaktif itu juga telah diterima sekolah – sekolah di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.577 IFP.

"Kami berharap agar sarana-sarana yang sudah dialokasikan untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo," ucapnya.

Dikatakannya tahun 2026 ini Kemendikdasmen juga sudah mengalokasikan 11.400 lebih revitalisasi satuan pendidikan. Sebagian sekolah bahkan sudah terverifikasi dan tervalidasi untuk segera dilakukan perjanjian kerjasama pelaksanaan program. Alokasi tersebut ujar Prof. Dr. Abdul Mu'ti, bakal ditambah untuk 60 ribu satuan pendidikan.

"Insyaallah sesuai dengan komitmen bapak presiden, tahun ini ada tambahan untuk 60 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi," ucapnya.

Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana juga mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas dukungan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya program tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Disampaikannya bahwa tahun 2025 lalu terdapat 29 sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sidoarjo telah menerima bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Bantuan tersebut diberikan kepada 2 TK, 24 SD dan 3 SMP. Nilainya mencapai Rp. 20.3 milyar.

"ijinkan saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan," ucapnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana juga mengatakan Pemkab Sidoarjo juga terus menunjukkan komitmennya terhadap kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penyerapan anggaran rehabilitasi sekolah tahun 2025 lalu sebesar Rp. 79,5 milyar. Pada tahun 2025 juga, Pemkab Sidoarjo kembali melanjutkan pembangunan SMPN 2 Tulangan dengan anggaran Rp. 8,1 milyar. Ditahun yang sama, juga dibangun SMPN 2 Prambon dengan anggaran Rp. 7,1 milyar.

"Untuk tahun 2026 ini anggaran (rehabilitasi sekolah) kami sediakan Rp. 40,6 milyar," ujarnya.

Wabup Hj. Mimik Idayana berharap bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat diterima kembali oleh Kabupaten Sidoarjo. Bahkan jumlah sekolah penerima manfaat program tersebut dapat bertambah. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat. Dengan begitu ia yakin program strategis seperti ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia sendiri berharap besar akan program tersebut untuk mencetak generasi Sidoarjo yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan.

"Kami juga berkomitmen memastikan pelaksanaan program ini berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran," tegasnya.

Post Views: 10

Tag: # 45 Sekolah di Sidoarjo Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah Pusat | # Berita hari ini # Kabupaten Sidoarjo

Topik: # 45 Sekolah di Sidoarjo Dapat Bantuan Revitalisasi dari Pemerintah Pusat

Penulis: Yunda Sundari

Pos Terkait



Home > Pendidikan

Wabup Sidoarjo Mimik Idayana Minta Tambahan Kuota Revitalisasi Satuan Pendidikan, Mendikdasmen Langsung Setujui

by **ZonaJatim00** — 14 April 2026 in Pendidikan

0

0
SHARES

Share on Facebook

Share on Twitter



Zonajatim.com, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo mendapat perhatian dari Mendikdasmen. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) meresmikan 29 program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof DR Abdul Mu'ti, dalam acara yang digelar di Aula SMP Negeri 4 Sidoarjo, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Selasa (14/4/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Kadikbud Tirto Adi.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. "Program revitalisasi ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo," ujarnya.

Wabup Mimik Idayana menjelaskan, pada tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan revitalisasi untuk 29 satuan pendidikan yang terdiri dari 2 taman kanak-kanak (TK), 24 sekolah dasar (SD), dan 3 sekolah menengah pertama (SMP), dengan total anggaran mencapai Rp20,3 miliar.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Wabup Mimik Idayana saat sambutan



Wabup Mimik saat menyambut Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Wabup Mimik berharap, dukungan dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut pada tahun 2026 agar semakin banyak sekolah yang mendapatkan manfaat program serupa. "Kami berharap pak Mendikdasmen menambah kuota revitalisasi satuan pendidikan di Sidoarjo lebih banyak lagi," pinta Wabup Mimik Idayana.

Selain dari APBN, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Di antaranya pembangunan SMP Negeri 2 Tulangan dan SMP Negeri 2 Prambon dengan total anggaran sekitar Rp7,1 miliar, serta berbagai program rehabilitasi sekolah lainnya.



"Kami berkomitmen memastikan pelaksanaan program ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga mampu mencetak generasi Sidoarjo yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan," tambahnya.

Atas permintaan Wabup Mimik Idayana, Mendikdasmen Abdul Mu'ti langsung menyetujui penambahan kuota.

Untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri, total terdapat 45 satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dengan nilai mencapai sekitar Rp45 miliar, mencakup jenjang PAUD, SD, hingga SMP.

Zonajatim.com



Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat beri arahan

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menekankan pentingnya perawatan terhadap fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami berharap gedung yang sudah dibangun ini dirawat dengan baik dan digunakan secara maksimal untuk mencetak peserta didik yang berkualitas," tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional. Secara nasional, Kemendikdasmen telah merevitalisasi sebanyak 16.167 satuan pendidikan.

Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi pendidikan. Secara nasional, lebih dari 68 ribu perangkat pendukung internet telah didistribusikan, sementara di Sidoarjo mencapai 1.577 satuan pendidikan.

"Kami berharap seluruh sarana yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik guna mendukung kualitas pembelajaran di Sidoarjo," ujarnya.

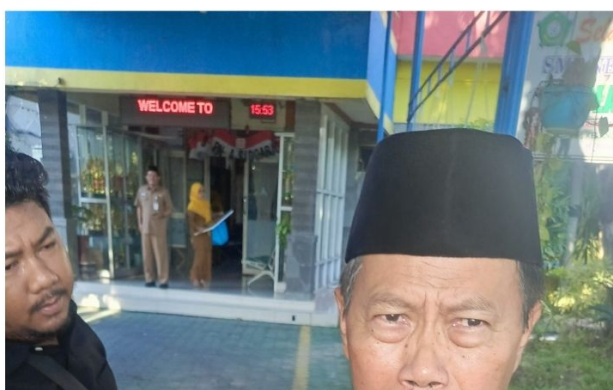


Kepala Sekolah SD Sidodadi Candi Anita ikut menerima plakat granit peresmian revitalisasi satuan pendidikan

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti menyebut bahwa pada tahun 2026 pemerintah menargetkan tambahan revitalisasi untuk puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari komitmen Presiden dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Tak hanya itu, peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus pemerintah. Pada tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan beasiswa kepada 12.500 guru untuk melanjutkan pendidikan S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program tersebut ditargetkan dapat meluluskan angkatan pertama pada pertengahan 2026, sekaligus membuka peluang bagi guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikasi.






INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Zonajatim.com

Kemendikdasmen memberikan beasiswa kepada 12.500 guru untuk melanjutkan pendidikan S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program tersebut ditargetkan dapat meluluskan angkatan pertama pada pertengahan 2026, sekaligus membuka peluang bagi guru untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperoleh sertifikasi.



Kadikbud Tirto Adi saat diwawancarai

Kadikbud Sidoarjo DR Tirto Adi mengaku senang bahwa Sidoarjo mendapat perhatian khusus dari Kemendikdasmen dalam program revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi. "Ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Sidoarjo menuju era Indonesia emas," Paparnya. Pr

Tags: [Mendikdasmen](#) [Revitalisasi satuan pendidikan](#) [Sidoarjo](#)

Previous Post: [Prihatin Genangan Air Jalan, Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo Minta Pemkab Revitalisasi Drainase](#)

Next Post: [Polresta Sidoarjo Dorong Swasembada Pangan, Lahan Melon di Prambon Siap Panen](#)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar

Zonajatim.com